



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FENNY APRIDAWATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 160923

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.195.000.000**

1. Tanah Seluas 1221 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/207 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 3.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 975 m2/655 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
6. Bangunan Seluas 35.21 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 699.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000



5. MOBIL, SUZUKI IGNIS MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	280.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	179.676.563
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.353.676.563
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.353.676.563

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.